

CATRA

MENGAYOMI DAN MENCERDASKAN

MAJALAH SETJEN WANTANNAS



EDISI XIV
MEI 2017

Kemana Buruh Harus Mengadu?

Dilema Nasib Buruh yang Tak Kunjung Beruntung

REVOLUSI HIJAU DAN PERTANIAN ORGANIK

BISAKAH KORUPSI DIBERANTAS?

**MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI
MELALUI KAJIAN LUAR NEGERI**

SALAM REDAKSI

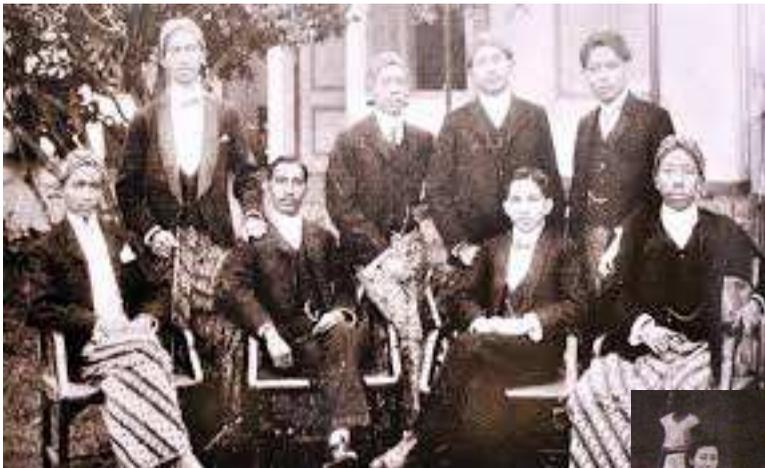
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian
Om Swastyastu
Shalom

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), hari yang menjadi momentum perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang ditandai dengan kelahiran organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908. Kebangkitan nasional merupakan bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan dan kesadaran sebagai sebuah bangsa untuk memajukan diri melalui gerakan organisasi yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan.

20 Mei 2017 bertepatan dengan Harkitnas ke-109, bangsa ini harus kembali pada semangat ke Bhinneka Tunggal Ika, semangat Pancasila dan rasa senasib dan sebangsa, kembali pada kepribadian nasionalnya sendiri. Suatu negara jika ingin kuat dan langgeng harus ditata berdasarkan hukumnya sendiri dan berdiri di atas kepribadian nasionalnya sendiri.

“Semoga peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini juga memperbarui semangat Trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.”

REDAKSI



BOEDI OETOMO
1908



Redaksi

MAJALAH CATRA

Jl. Medan Merdeka Barat No.15

Jakarta Pusat - 10110

Telp. 021- 3863983 Fax 021-3441683

email: rodangmas@dkn.go.id

DAFTAR ISI

OPINI



- 4 REVOLUSI HIJAU DAN PERTANIAN ORGANIK



- 7 BISA-KAH KORUPSI DIBERANTAS?

TAJUK UTAMA



- 9 KEMANA BURUH HARUS MENGADU?
Dilema Nasib Buruh yang Tak Kunjung Beruntung

PROFIL



- 14 Mayjen TNI Toto Siswanto, S.IP, MM.

KEBIJAKAN PEMERINTAH



- 16 TOLERANSI PENGGUNAAN CANTRANG
HINGGA 2017

INFO KITA



- 18 ANTISIPASI DAN SOLUSI KONFLIK SOSIAL
DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL



- 21 KUNJUNGAN MAHASISWA UNIVERSITAS
SULTAN AGENG TIRTAYASA



- 22 MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI
MELALUI KAJIAN LUAR NEGERI

Inspirasi Bulan Ini TIDAK ADA YANG SIA-SIA



Optimisme adalah memandang hidup ini sebagai persembahan terbaik. Tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja dan mengalir sia-sia. Pasti ada maksud dan tujuan. Mungkin saja anda mendapat pengalaman buruk yang tak menyenangkan. Bisa jadi keburukan itu karena anda hanya melihat dari satu sisi mata uang saja. Bila anda berani menengok ke sisi yang lain, anda akan menemukan pemandangan yang jauh berbeda.

Anda tidak harus menjadi orang yang tersenyum terus atau selalu menampakkan wajah ceria. Optimisme terletak di dalam hati, buka hanya terpampang di muka. Jadilah optimis, karena hidup terlalu rumit untuk dipandang dengan mengerutkan alis.

Setiap tetes air yang keluar dari mata air, mereka tahu akan mengalir menuju ke laut. Meski harus melalui anak sungai, selokan, kali yang keruh, danau ataupun muara. Namun, mereka yakin perjalanan mereka bukan tanpa tujuan.

Bahkan, mereka menunggu di samudra. Setiap tetes air tahu, suatu saat panas dan angin akan membawa mereka ke pucuk-pucuk gunung. Menjadi awan dan menurunkan hujan. Sebagian menyuburkan rerumputan, sebagian tertampung dalam sumur-sumur. Sebagian kembali ke laut.

“Tak ada manusia yang terlahir sempurna, setiap orang bisa saja punya kenangan buruk di masa lalu, tapi, tak pernah ada kata terlambat ketika kamu mau berubah dan melangkah maju. Tak ada gunanya menyalahkan orang lain. Teruslah maju”



REVOLUSI HIJAU DAN PERTANIAN ORGANIK

Oleh: Muhammad Iqbal

Gambar oleh : Google

Fenomena masyarakat dunia setelah Perang Dunia II usai ditandai dengan penataan kehidupan melalui implementasi pembangunan di segala bidang. Salah satu bidang pembangunan yang cukup krusial dan mendesak adalah dalam hal penyediaan pangan melalui peningkatan produksi pertanian. Upaya peningkatan produksi pertanian ditempuh melalui program yang dikenal dengan nama "Revolusi Hijau (*Green Revolution*)".

Belakangan, Revolusi Hijau tersebut banyak mengalami kritikan karena telah menimbulkan penurunan kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan akibat pemakaian pupuk dan pestisida kimia yang tidak terkendali. Salah satu solusinya adalah dengan cara kembali ke alam semula jadi (*back to nature*) melalui "Sistem Pertanian Organik". Oleh karena itu, Sistem Pertanian Organik dapat dianggap sebagai antitesis atau gerakan oposisi terhadap Revolusi Hijau.

REVOLUSI HIJAU

Terminologi Revolusi Hijau terdiri dari dua kata yaitu "revolusi" dan "hijau". Kata "revolusi" berhubungan dengan perubahan yang berlangsung secara cepat menyangkut dasar dan pokok-pokok kehidupan. Sementara itu, kata "hijau" merujuk kepada warna alam pertanian simbol kesuburan (*ijo royo-royo*). Oleh karena itu, "Revolusi Hijau" adalah transformasi fundamental dalam pemanfaatan teknologi budidaya pertanian dari pola tradisional menjadi sistem modern.

Revolusi Hijau awalnya diprakarsai oleh *Ford and Rockefeller Foundation* melalui

pengembangan tanaman gandum di Meksiko dan tanaman padi di Filipina, masing-masing padatahun 1950 dan tahun 1960. Kemudian praktik berikutnya meluas pada negara-negara lain utamanya di Asia, selama rentang waktu 1950-an hingga 1980-an. Revolusi Hijau lebih menekankan pada tanaman pangan jenis sereal (biji-bijian) seperti padi, jagung, gandum, dan lain-lain melalui implementasi 4 (empat) pilar kegiatan yaitu: (1) penyediaan air irigasi; (2) penggunaan varietas unggul; (3) pemakaian pupuk kimia secara optimal; dan (4) penggunaan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme pengganggu tanaman.

Di Indonesia, Revolusi Hijau diterapkan melalui program ekstensifikasi (perluasan areal) dan program intensifikasi dengan Panca Usaha tani yaitu: (1) teknik pengolahan lahan; (2) pengaturan irigasi; (3) penggunaan bibit unggul; (4) pemupukan; dan (5) pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Melalui kedua program tersebut, dampak positifnya adalah intensitas tanam dan produksi tanaman pangan meningkat secara signifikan. Salah satu contoh konkretnya adalah tercapainya swasembada beras pada tahun 1984.

Terlepas dari dampak positifnya, Revolusi Hijau juga menimbulkan dampak negatif berupa terganggunya keseimbangan alam atau *environmental degradation* seperti: (1) penurunan keanekaragaman hayati; (2) ketergantungan tanaman pada pupuk; dan (3) munculnya jenis hama baru yang resisten akibat penggunaan pestisida. Dampak negatif tersebut sebetulnya lebih disebabkan oleh penggunaan teknologi yang tidak memandang kaidah-kaidah normatif. Oleh karena itu, salah satu solusi mendasar untuk mengatasi

dampak negatif Revolusi Hijau adalah dengan cara menerapkan "Pertanian Organik".

PERTANIAN ORGANIK

Walaupun Pertanian Organik dapat dianggap sebagai respon terhadap Revolusi Hijau, jauh sebelumnya sistem ini sudah digagas oleh Sir Albert Howard melalui tulisannya yang berjudul "*An Agricultural Testament*" pada tahun 1940.

Tulisan tersebut menjadi inspirasi bagi para pegiat pertanian organik untuk menerapkan Sistem Pertanian Organik secara sistematis, termasuk dalam rangka mengatasi dampak negatif dari implementasi Revolusi Hijau. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik

disebutkan bahwa: (1) Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah; (2) Pertanian organik menekankan penerapan praktik-praktik manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat; dan (3) Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.

Dalam realitanya, ada dua pemahaman terhadap Sistem Pertanian Organik. *Pertama*, dalam arti sempit, penerapan Sistem Pertanian Organik adalah bebas dari bahan kimia (hanya menggunakan materi alami). Kedua, dalam perspektif yang lebih luas, pelaksanaan Sistem

Pertanian Organik adalah dengan mengandalkan materi alami seraya menghindari atau membatasi penggunaan bahan kimia sintesis. Keduanya ditujukan untuk penyediaan produk pertanian (terutama bahan pangan) yang aman bagi kesehatan seraya menjaga keseimbangan lingkungan.

Secara prinsip, Sistem Pertanian Organik menganut beberapa kaidah. Pertama, kaidah kesehatan yang dapat melestarikan kesehatan



Gambar oleh : Google

tanah, tanaman, hewan, dan manusia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua, kaidah ekologi yang didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Ketiga, kaidah keadilan yang dapat membangun hubungan dan sekaligus menjamin keadilan dengan lingkungan. Keempat, kaidah perlindungan yang dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan generasi sekarang dan mendatang berikut lingkungan hidupnya.

Sistem Pertanian Organik memiliki beberapa manfaat. Diantaranya, adalah dalam rangka: (1) meningkatkan aktivitas organisme yang menguntungkan bagi tanaman; (2) meningkatkan cita rasa dan kandungan gizi tanaman; (3) meningkatkan ketahanan tanaman dari serangan organisme pengganggu; (4) memperpanjang unsur simpan dan sekaligus memperbaiki struktur tanaman; dan (5) membantu mengurangi erosi lahan.

Kendati pertanian organik mengandung arti positif bagi kesehatan manusia dan lingkungan, implementasi sistem ini belum sepenuhnya memasyarakat. Secara global, rataan pertumbuhan areal pertanian organik selama satu dasawarsa terakhir adalah sekitar 13,4 persen per tahun. Di Indonesia sendiri, rataan pertumbuhannya jauh lebih rendah lagi yaitu hanya 2,8 persen per tahun pada dasawarsa yang sama.



Gambar oleh : Google

Kurang pesatnya laju pertumbuhan pertanian organik disebabkan oleh beberapa faktor. Kendala utamanya antara lain: (1) ketersediaan bahan organik terbatas dan takaran volumenya harus banyak dengan biaya transportasi cukup mahal karena materinya bersifat ruah atau curah (*bulk*); (2) produktivitas tanaman lebih rendah; dan (3) pengendalian hama dan penyakit tanaman kurang efektif jika dibandingkan dengan penggunaan pestisida kimia.

Kenyataan menunjukkan bahwa banyak pelaku pertanian (terutama petani skala kecil) kurang tertarik dengan Sistem Pertanian Organik karena beberapa alasan. Pertama, pengelolaan sistem pertanian organik agak jelimet (*quite complicated*). Kedua, sulit merubah pola pikir (*mindset*) petani yang selama ini sudah cukup lama dan terbiasa melakukan budidaya pertanian dengan sistem pertanian non-organik (menggunakan pupuk dan pestisida kimia). Ketiga, proses konversi lahan dari pertanian non-organik ke pertanian organik memerlukan waktu cukup lama, paling kurang 1-3 tahun. Keempat, produktivitas pertanian organik lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas pertanian bukan non-organik. Kelima, insentif berupa harga untuk produksi pertanian organik relatif tidak jauh berbeda dari pada harga produksi pertanian non-organik. Keenam, pertanian organik baru diakui keabsahannya apabila telah mendapatkan sertifikat dari institusi berwenang yaitu Lembaga Sertifikasi Organik (LSO). Ketujuh, sosialisasi penyebaran informasi sistem pertanian organik masih belum optimal.

PENUTUP

Terlepas dari faktor kendala yang dihadapi dalam implementasi Pertanian Organik, sistem ini patut jadi perhatian kita bersama. Sebagai catatan, lebih dari 60 persen lahan sawah di Pulau Jawa mengalami degradasi kesuburan yang diindikasikan oleh rendahnya kandungan bahan organik. Konsekuensinya, tanah menjadi keras dan liat karena ditengarai banyak mengandung sisa-sisa pupuk kimiawi. Selain itu, akhir-akhir ini kasus jumlah penderita penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol cenderung meningkat dan perlu kita waspadai bersama. Salah satu penyebabnya bersumber dari makanan tidak sehat seperti produk pangan yang mengandung residu pestisida dari pertanian bukan organik.

Kesadaran terhadap konsumsi produk pertanian organik sudah ada, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke atas (*elite*). Pertanyaannya, apakah kita termasuk ke dalam



Gambar oleh : Google

kalangan kasta tersebut? Ya atau tidak jawabannya, kita harus peduli (*concern*) terhadap Sistem Pertanian Organik. Kita seyogianya harus segera “go organic” dalam rangka memperoleh pangan yang aman di konsumsi (*food safety attributes*), mengandung nutrisi tinggi (*nutritional attributes*), dan ramah lingkungan (*eco-labeling attributes*).

Alangkah indahnya hidup ini kalau kita dapat meluangkan waktu sambil bertani organik mulai dari sekarang. Apalagi di saat purna tugas kelak, sambil olahraga merawat tanaman dan menikmati hasilnya. **Know your farm, know your food...****** (Referensi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013)



Pemahaman tentang korupsi berbeda-beda. Tergantung siapa dan tempat “korupsi” itu dimaknai. Pemahaman ilmuwan tidak sama dengan korupsi dalam pengertian masyarakat luas, begitu juga berbeda dengan pemahaman para penegak hukum, misalnya Polisi, Jaksa dan Hakim. Contohnya, dana Partai Politik sering masuk kategori korupsi, tetapi di beberapa negara dianggap bukan korupsi. Dalam tulisan ini lebih pada pemahaman masyarakat umum. Sedangkan penyebab terjadinya korupsi juga berbagai macam. Ada faktor tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rasionalization*) – (Bologna dan Lindquist: 1995). Ada juga yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab korupsi seperti: (1) aspek perilaku individu; (2) aspek organisasi; dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. (Arifin:2000).

Suatu saat, dalam suatu laman, Presiden Indonesia kedua yaitu Mohammad Soeharto termasuk dari beberapa tokoh dunia yang ekpos melakukan korupsi, seperti : Teodoro Obiang Nguema Mbasogo dari Republik Guinea Khatulistiwa; Humberto Moreira mantan Gubernur Negara Bagian Coahuila, Meksiko; Jenderal Xu Caihou dari China; Yusuf "Erap" Ejercito Estrada Presiden Filipina; José Arnoldo Alemán Lacayo Presiden Nikaragua; Pavlo Lazarenko Ivanovych Perdana Menteri Ukraina; Alberto Fujimori Ken'ya Presiden Peru; Jean-Claude Duvalier Presiden Haiti; Slobodan Milosevic Presiden Serbia dan

Yugoslavia; Umum Sani Abacha Presiden Nigeria; Mobutu Sese Seko Nkuku Ngbendu wa Za Banga Presiden Republik Demokratik Kongo; Ferdinand Marcos Emmanuel Edralin Presiden Filipina; dan Mohammad Soeharto Presiden Republik Indonesia. Ada sahabat mengatakan “Bisa dituntut itu”. Tidak ada keputusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Presiden Soeharto melakukan korupsi”. Memang idealnya, pelaku korupsi ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Uang yang dikorupsi dikembalikan ke negara dan pelakunya dihukum. *Lha...*bagi yang menganut filosofi realisme (faham yang berdasarkan pada kenyataan sesungguhnya) bahwa kenyataan tidak mesti menunggu adanya keputusan. *Toh...*tidak semua koruptor bisa dijerat atau terjangkau penegak hukum. *Wong* koruptor itu temannya banyak, uangnya banyak, jaringannya banyak dan kuat, tahu celah-celah hukum, dan seterusnya.

GRAND CORRUPTION

Sebenarnya korupsi tidak hanya uang besar atau jumlah banyak. Ada kategori tingkat korupsi. Ada kategori tikus (*mice corruption*) sampai tingkat harimau (*grand corruption*). Ada tingkat ribuan rupiah hingga trilyunan. Dari tingkat pemungut sampah hingga pejabat PBB. Dari Juru Parkir hingga Kepala Bandara atau Kepala Syahbandar. Dari pencatat absensi hingga Presiden Direktur. Kalau korupsi tingkat kecil-kecilan, penegak hukum cenderung enggan menindak, hanya menambah pekerjaan saja, dianggap tidak

sepadan dengan daya dan upaya penegakkan hukum. Sebaliknya pada tingkat *grand corruption* tidak mudah, perlu keberanian ekstra, yang melindungi dan membela banyak dan kuat, perlu kerja keras.

HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA

Masyarakat dunia, sebenarnya memberikan perhatian dan support besar terhadap upaya pemberantasan korupsi. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003. Dalam Sidang Umumnya, menetapkan tanggal 9 Desember sebagai **Hari Anti Korupsi Internasional**. Hal ini untuk membangkitkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap korupsi. PBB mendesak semua negara dan organisasi-organisasi regional untuk menanda-tangani dan mensahkan Konvensi PBB melawan Korupsi (*UNCAC: United Nations Covention Against Corruption*) sebagai jaminan perlawanan terhadap korupsi. Konvensi Anti Korupsi PBB ini sepakati oleh 133 negara.

MENGAPA MEMBERANTAS KORUPSI TIDAK MUDAH?

Berangkat dari filosofi yang berbeda antara pelaku dan pemberantas (penegak hukum) korupsi. Para pelaku korupsi (dan barangkali juga masyarakat) berangkat dari filosofi materialisme. Bahwa orang yang mempunyai materi cukup atau lebih dianggap sejahtera, makmur, dikarunia rejeki, status sosial terhormat. Sementara para pemberantas korupsi berangkat dari filosofi idealisme. Berangkat dari alam ide atau gagasan. Bahwa korupsi itu melanggar hukum, maka harus di hukum. Undang-undang disusun atas kondisi yang ideal, kelembagaan dan sumber daya manusia pun juga se-ideal mungkin, seadil mungkin. Menjadi lebih *complicated*, bila pemberantasan korupsi dikaitkan dengan politik (kekuasaan), kebijakan Pimpinan Pemerintah, loyalitas Korp, kontribusi terhadap Parpol. Sehingga tidak heran apabila tindak pidana korupsi, gratifikasi, pencucian uang dan sejenisnya, ada yang bisa ditindak dan banyak pula yang tak tersentuh. Maka dari itu apa yang dikatakan Lord Acton "***power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely***" itu tampaknya tepat untuk menggambarkan dekatnya penguasa dan tindak pidana korupsi.

UPAYA MEMBERANTAS DAN MENCEGAH KORUPSI

Menyikapi fenomena ini, Pemerintah silih berganti menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama. Undang Undang beserta Peraturan Pelaksanaan berkaitan dengan korupsi dibuat sebagai "**bukti**" keseriusan dalam memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi

di Indonesia. Faktanya, seolah lingkaran setan yang sulit dicari ujung pangkalnya. Sebenarnya masyarakat Indonesia semuanya anti korupsi, kecuali para koruptor itu sendiri dan keluarganya.

Sumber dari segala sumber atau barangkali pangkal penyebab korupsi adalah "cinta dunia". Dan sayangnya, dengan sadar atau setengah sadar, justru masyarakat mengamalkan. Saat ini, masyarakat menjadikan "kepentingan duniawi" adalah segalanya. Orang berkelahi, kalau dicari sumbernya ya kepentingan. Suami-istri cerai, ya sumbernya kepentingan duniawi. Bukan berebut surga. Menyuaip petugas entri absensi, ya karena kepentingan dunia. Konflik Parpol, ya karena kepentingan... Oleh karena itu, yang perlu dirubah adalah konsep tentang "kepentingan dunia," misalnya, dalam konsep beragama, saat ini banyak yang sekedar simbolik. Miskin penghayatan. Kurang substansial. Masyarakat sholeh jangan hanya aspek individual, tetapi sholeh secara sosial. Baik di dalam keluarga, masyarakat maupun tempat kerja. Makin banyak ditemui fenomena masyarakat berstatus "haji" dan status religi yang lain terjerat kasus korupsi.

Sayangnya saat ini, yang substansi tersebut semakin tergerus erosi kepentingan duniawi. Oleh karena itu, waktunya untuk introspeksi. Apakah perilaku masyarakat dan anak bangsa ini sudah jauh dari nilai-nilai luhur yang membesarkan bangsa Indonesia. Bagaimana mau melawan kebusukan-kebusukan dan semua yang korup, kalau yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa dirinya sendiri busuk atau tidak?

PENUTUP

Pujangga besar dari Keraton Surakarta yaitu Raden Ngabehi Ronggowarsito pernah mensitir bahwa suatu saat akan datang suatu masa yang penuh dengan rekayasa. Seperti "*gabah di interi*" (bulir padi ditampi). Sulit membedakan mana kosong mana isi. Sehingga rakyat banyak, orang biasa, dan masyarakat umum yang jumlahnya makin banyak namun tidak mempunyai kekuatan yang berarti. Seperti buih di laut. Hanya beberapa gelintir atau kelompok tertentu yang mempunyai peran dan merekayasa.

Harapan besar selalu masih menyala. Masih banyak orang baik di sekitar kita. Masih banyak anak negeri yang luar biasa baik dan penuh semangat membara. Terutama, kaum muda yang belum banyak terkontaminasi "kecintaan duniawi". Kaum muda yang mampu menjaga idealisme dan nilai-nilai luhur. Banyak yang mengerti 'aturan' dan faham Al Qur'an. Semoga bisa menggalang masyarakat dan anak bangsa untuk menjadi bangsa besar dan kuat. Bukan hanya sekedar buih ombak di laut.****

Kemana Buruh Harus Mengadu?

Dilema Nasib Buruh Yang Tak Kunjung Beruntung



Gambar oleh : Google

Oleh: J. Hariyadi

Sejak dulu nasib buruh selalu pilu. Kehidupan mereka seakan tak menentu, bagaikan hidup segan mati tak mau. Mereka selalu menjadi korban ketidakadilan para pengusaha.

Tenaganya diperas ketika dibutuhkan. Sedikit saja ada kesalahan, mereka langsung dicampakkan. Masa depan mereka pun terabaikan. Ibarat kata pepatah “*Habis Manis Sepah Dibuang*”.

Jangan abaikan peran kaum buruh. Mereka ikut berjasa dalam mendorong perekonomian bangsa. Tanpa mereka, bagaimana mungkin pengusaha bisa menjalankan produksi usahanya. Oleh sebab itu para pengusaha yang memperkerjakan buruh harus mau memperhatikan kesejahteraan mereka.

Masih banyak pengusaha yang kurang peduli dengan nasib buruh. Mereka menganggap buruh tidak lebih dari sekadar alat untuk membantu memperkaya dirinya. Buruh bagaikan benda mati yang bisa dibeli dan dibuang kapan saja, sesuai kebutuhan mereka.

Cara berpikir pengusaha yang seperti itu tentu saja salah. *Mindset* mereka tentang buruh harus diubah. Mereka tidak boleh hanya berpikir dari sisi bisnis semata, sebab buruh adalah

manusia, bukan benda mati yang tidak memiliki jiwa. Jangan hanya karena prinsip ekonomi, lantas masa depan buruh diabaikan begitu saja.

Tidak heran kalau setiap tahun terjadi demo yang dilakukan oleh kaum buruh. Tidak mungkin mereka melakukan aksi turun ke jalan kalau semuanya baik-baik saja. Pasti ada masalah yang melatarbelakanginya.

REFLEKSI INDUSTRIALISASI DI INDONESIA

Indonesia mengalami era industrialisasi sejak 1950-an. Pada saat itu kondisi industri belum berkembang begitu pesat. Hal ini bisa dimaklumi karena pemerintah memiliki banyak keterbatasan permodalan. Sejak awal kemerdekaan, Presiden Soekarno yang memerintah saat itu menerapkan prinsip kemandirian. Pemerintah sangat yakin kalau Indonesia bisa berkembang di atas kaki sendiri. Tidak heran kalau pemerintah menentang keras masuknya berbagai bantuan asing, baik berupa investasi maupun pinjaman.

Namun, paska terjadinya peristiwa G30S-PKI yang menyebabkan kejatuhan Soekarno, kebijakan pemerintah berubah. Sejak kekuasaan berpindah tangan ke Presiden Soeharto, justru

Pemerintah membuka lebar-lebar masuknya investasi asing. Hubungan baik dengan berbagai negara kapitalis seperti Amerika dan Inggris, membuat kebijakan pemerintah ikut dipengaruhi oleh negara-negara tersebut.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pembangunan di bidang ekonomi yang berbasis industri meningkat pesat. Langkah strategis yang dilakukan oleh pemimpin Orde Baru tersebut adalah melakukan kerja sama dengan *International Monetary Fund (IMF)* dan *World Bank* – keduanya merupakan lembaga donor internasional. Sayangnya lembaga donor yang katanya mau membantu Indonesia,

ekonomi ternyata masih berlanjut dan berkepanjangan. Hal ini bukan hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga merambah sampai ke pedesaan. Pengangguran terjadi dimana-mana, sehingga jumlah rakyat miskin kian bertambah. Pemerintah tidak mampu menyiapkan lapangan kerja yang cukup bagi warganya.

Para pengangguran sulit mencari pekerjaan. Minimnya lapangan pekerjaan membuat kondisi buruh kian terjepit. Posisi tawar buruh terhadap perusahaan semakin rendah. Akhirnya mereka mau bekerja apa saja meskipun dengan upah minim dan tanpa kesejahteraan. Bagi mereka, bekerja bukan lagi untuk kesejahteraan, melainkan sekadar untuk bertahan hidup.

NASIB BURUH DAN TEORI MASLOW

Dalam “Teori Piramida Kebutuhan” Abraham Maslow diungkapkan bahwa manusia mempunyai lima kebutuhan dasar dalam hidupnya, yaitu psikologis (makan, minum, seks), rasa aman, cinta, *esteem needs* (kebutuhan untuk dihargai atau kebutuhan terhadap status sosial), dan *self actualization* (kebutuhan mengaktualisasikan diri). Kalau hal ini kita hubungkan dengan teori di atas, kondisi perburuhan saat ini sama sekali tidak menyediakan kebutuhan tersebut.

Pertama, kebutuhan psikologis

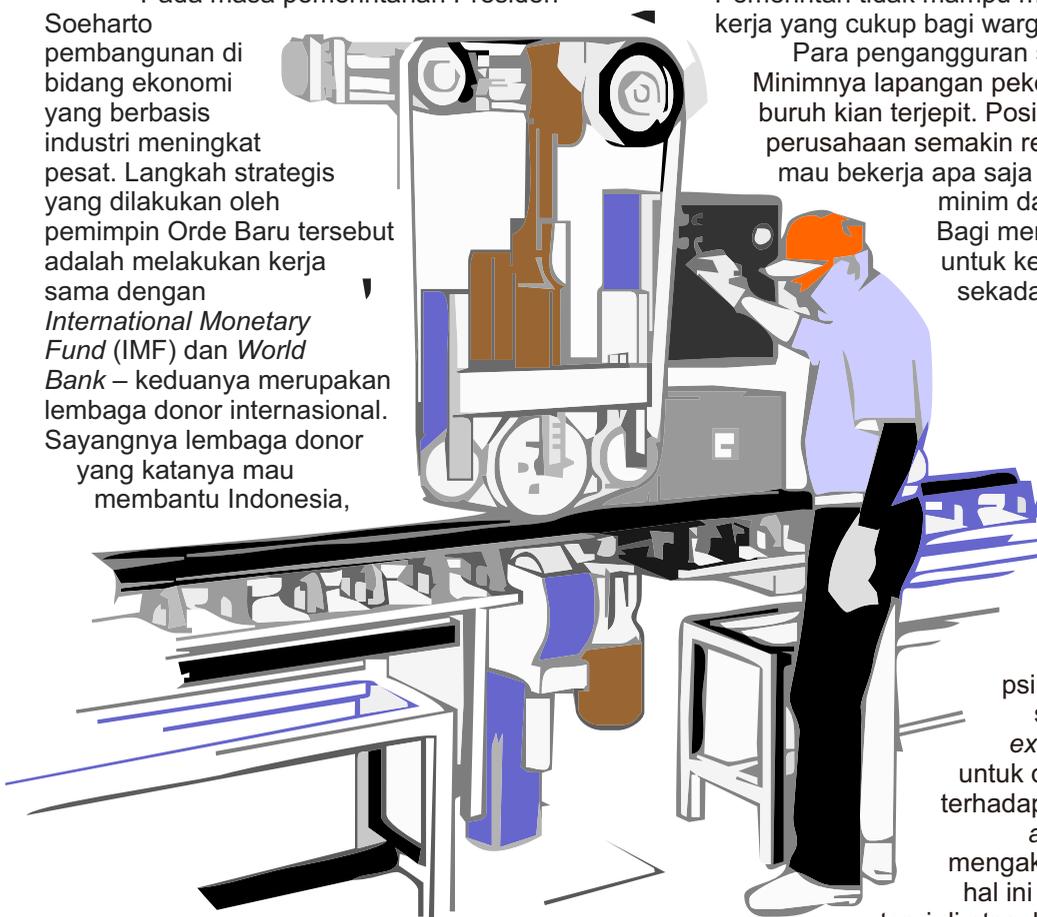
Penghasilan buruh begitu minim, sehingga menjadi dilema tersendiri. Bagi kaum buruh, bisa makan saja sudah bersyukur. Bahkan, terkadang masih kesulitan memenuhinya. Wajar saja kalau secara psikologis mereka banyak mengeluh dan tidak bahagia.

Kedua, kebutuhan rasa aman

Hal ini erat kaitannya dengan pendapatan dan jaminan kehidupan masa depan mereka. Bagi buruh *outsourcing*, hidup mereka selalu dihantui ketakutan. Bisa saja besok atau lusa dipecat dan menganggur, sehingga dari hari ke hari selalu was-was dan hidup penuh dengan kekhawatiran.

Ketiga, kebutuhan cinta, mencintai, dan dicintai.

Kesibukan bekerja yang selalu *over time* mengejar lembur tidak memberikan ruang bagi buruh untuk mengekspresikan perasaan cintanya kepada lawan jenisnya. Hanya rasa lelah yang



Ternyata tidak seperti kita bayangkan. Mereka memiliki kepentingan dan agenda tersendiri terhadap Indonesia. Setiap bantuan yang diberikan, tentu ada harga yang harus dibayar. Salah satunya adalah ikut campur tangan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang industri.

Dampak bantuan dan investasi asing tersebut membuat Indonesia menjadi ketergantungan terhadap negara-negara donor. Hal ini membuat bangsa kita seperti terjajah dengan berbagai kepentingan dari pihak yang membantu, sehingga bisa membuat bangsa kita lemah dan menjadi budak bangsa asing.

Krisis ekonomi yang melanda dunia pada 1998 juga berimbas ke Indonesia. Situasi ekonomi dan politik yang tidak stabil menyebabkan terjadinya peristiwa kerusuhan yang berujung tumbang rezim Soeharto. Kemudian Indonesia memasuki era baru yang disebut era reformasi. Meskipun pemerintahan silih berganti, tetapi krisis



dimiliki mereka. Tidak heran banyak buruh yang terlambat nikah karena merasa tak sanggup menghidupi keluarganya.

Keempat, *exteem needs* (kebutuhan untuk dihargai atau kebutuhan terhadap status sosial).

Umumnya status sosial kaum buruh berada di titik yang rendah. Apresiasi buruh bekerja hanya sebatas dorongan agar status mereka setingkat lebih tinggi dari status sosial penganggur.

Kelima, *self actualization* (kebutuhan mengaktualisasikan diri).

Buruh yang bekerja di perusahaan pada umumnya akan sulit mengaktualisasikan diri karena kerjanya sudah diatur oleh perusahaan. Penghargaan terhadap prestasi dalam perusahaan juga sangat rendah. Jarang sekali kita temukan buruh yang bisa memiliki karir sampai ke jenjang manajerial. Apalagi dengan sistem kontrak kerja (*outsourcing*), yang tidak akan mendapat apa-apa meskipun prestasi kerjanya tinggi.

SOLUSI DALAM MENGHADAPI NASIB BURUH

Pasti tidak ada orang yang suka menderita. Pilihan menjadi buruh bisa jadi bukan karena murni keinginan sendiri, melainkan karena terpaksa, tidak ada pilihan lain. Namun, ada juga orang yang memang tidak memiliki keterampilan

apa pun, sehingga dirinya mau tidak mau harus mencari pekerjaan. Apapun akan dilakukannya yang penting bisa bekerja dan mendapatkan upah. Dia tidak berpikir upahnya layak atau tidak, yang penting bisa memiliki penghasilan untuk sekadar menyambung hidupnya.

Dalam undang-undang sudah jelas bahwa salah satu tugas pemerintah adalah menyejahterakan masyarakatnya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membuat masyarakatnya menderita. Sudah sepantasnya pemerintah benar-benar memperhatikan kepentingan buruh ketika mengeluarkan sebuah kebijakan.

Para pihak yang berkepentingan terhadap buruh harus berpikir bijak dan tidak berat sebelah. Hal ini bertujuan agar terjadi sinergi dalam membangun kehidupan bangsa, sehingga rakyat menjadi sejahtera. Dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan nasib kaum buruh, hendaknya masing-masing pihak mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. KAUM BURUH

Sebelum memutuskan bekerja di sebuah perusahaan, sebaiknya mencari informasi yang tepat tentang reputasi perusahaan yang akan dilamarnya. Apakah perusahaan tersebut sudah memperhatikan kesejahteraan buruhnya atau

belum? Informasi mengenai hal ini bisa diperoleh melalui berbagai pemberitaan di media. Bisa juga dengan bertanya kepada para buruh yang sedang bekerja di perusahaan tersebut. Informasi yang diperoleh bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Kaum buruh sebaiknya mempelajari undang-undang tenaga kerja dan berbagai peraturan pemerintah, baik pusat maupun daerah yang berkaitan dengan regulasi dibidang ketenagakerjaan. Hal ini penting agar buruh memahami dengan benar konsekuensinya kalau bekerja. Buruh harus tahu hak dan kewajibannya sebagai pekerja dan tahu juga hak dan kewajiban pengusaha terhadap pekerja.

Buruh harus mau mempelajari dan memahami dengan baik terhadap hak-haknya saat

hendak bekerja, jangan diniatkan untuk menjadi pekerja selamanya. Jadikan pekerjaan sebagai buruh hanya sebagai pekerjaan sementara, sambil mencari pengalaman. Selama bekerja usahakan agar pandai bergaul dan memiliki banyak teman dan relasi. Kalau sudah mendapat pengalaman kerja, punya relasi yang luas, sebaiknya segera keluar dan mencoba mandiri dengan membuka usaha sendiri sesuai dengan keahliannya.

2. PENGUSAHA

Sebagai pengusaha sebaiknya jangan hanya berpikir keuntungan. Pikirkan juga nasib dan masa depan para buruh yang bekerja di perusahaannya. Buruh bukan benda mati yang bisa disamakan dengan komponen industri. Oleh sebab itu ketika mendirikan perusahaan harus



Gambar oleh : Google

menjalankan kontrak. Misalnya saja soal gaji dan tunjangan yang diperoleh. Kalau ada hal yang kurang jelas, sebaiknya ditanyakan dulu dan jangan langsung menandatangani.

Jika buruh sudah berkeluarga, sebaiknya jangan dua-duanya bekerja sebagai buruh, apalagi bekerja di tempat yang sama. Sebab, jika terjadi masalah di perusahaan tempat mereka bekerja, maka kedua-duanya akan terkena imbasnya. Usahakan salah satu pasangan ada yang bekerja secara terpisah di perusahaan lain atau bekerja secara mandiri, misalnya dengan berdagang makanan. Jika modal belum ada, bisa pinjam di koperasi atau bekerjasama dengan saudara atau teman yang memiliki modal dengan sistem bagi hasil.

Jika buruh masih *single*, sebaiknya ketika

sudah memperhitungkan dengan cermat dan matang agar sistem pengupahan di perusahaannya tidak merugikan buruh.

Memperhatikan dengan benar undang-undang tenaga kerja dan mematuhi, terutama dalam hal penetapan upah dan hak-hak mereka, seperti hak cuti, hak pensiun, upah lembur, asuransi kesehatan, dan lain-lain.

Jangan mudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan harus benar-benar memperhatikan kinerja buruh dengan benar dan terukur. Jangan seandainya melakukan PHK tanpa alasan yang jelas, sehingga merugikan buruh. Jika terpaksa melakukan PHK, maka buruh tersebut harus diberi pesangon yang layak.

3. PEMERINTAH

Membuat peraturan ketenagakerjaan yang menguntungkan kaum buruh. Jika ada investasi asing yang masuk ke Indonesia, pemerintah sebaiknya melindungi kaum buruh. Caranya yaitu dengan melarang investor asing membawa tenaga kerja dari negaranya ke Indonesia, kecuali jika tenaga kerja yang dibawa tersebut memiliki keahlian tertentu yang tidak dimiliki di Indonesia.

Membuka peluang sebesar-besarnya investor asing masuk ke Indonesia untuk membuka usaha baru, sehingga akan menyerap tenaga kerja yang banyak. Namun, dalam perjanjian dengan pihak investor harus memperhatikan upah buruh yang layak.

Meningkatkan Upah Minimal Regional (UMR) secara bertahap setiap tahunnya. Penentuan UMR juga harus memperhatikan suara dari pengusaha. Sebab kalau upah terlalu tinggi, sementara kemampuan pengusaha terbatas, bukan tidak mustahil banyak pengusaha yang gulung tikar. Efeknya bisa ditebak, akan banyak PHK yang pada akhirnya merugikan buruh.



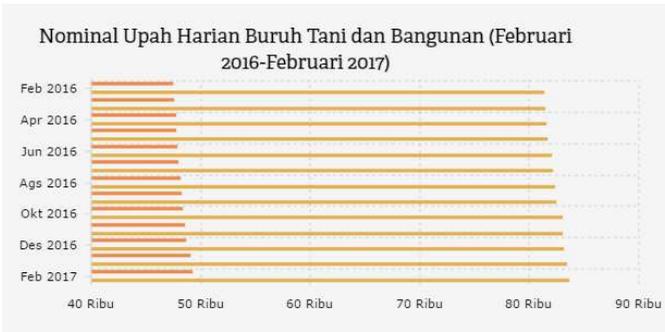
Gambar oleh : Google

4. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

Anggota DPR harus berada di belakang rakyat dan membela kepentingan buruh. Jika ada peraturan pemerintah yang merugikan, anggota DPR harus berjuang untuk membela buruh. Mereka wajib memanggil pemerintah dan mengajak dialog agar peraturan yang merugikan buruh tersebut segera direvisi dan dicari solusi terbaiknya.

Jika terjadi perselisihan antara kaum buruh dan pengusaha, anggota dewan harus lebih berpihak kepada kaum buruh. Mereka dipilih oleh rakyat, sudah sepantasnya membela kepentingan rakyat. Berbeda dengan para pengusaha yang sudah mapan kehidupannya, mereka tidak perlu dibela oleh anggota dewan. Justru rakyat kecil yang butuh pertolongan yang harus mereka bela.

Membuat undang-undang yang berpihak kepada kaum buruh dan mengubah undang-undang yang merugikan kaum buruh. ****



SEJARAH HARI BURUH DI INDONESIA

- 1918**: RAYUAN ANGGOTA SERIKAT BURUH HURDI YANG PRAE SUDAN MENGEKAL PERINGATAN HARI BURUH DI SURABAYA DAN MENJADI PERINGATAN HARI BURUH SEDUNYA PERTAMA KALI DI INDONESIA.
- 1921**: PERAYAAN HARI BURUH SUDAN HANYA DIDOMINASI GOLONGAN KOMUNE, TAPI JUGA NON KOMUNE.
- 1926**: MENESANG RENCANA PEMBOYKOTAN PKI MELAWAN KOLONIALISME BELANDA, PERINGATAN HARI BURUH DITADAKAN.
- 1946**: PERINGATAN HARI BURUH KEMBALI DIPERINGATI.
- 1948**: DIKELUARKAN UU KERJA NOMOR 12/1948, MENDESANANG 1 ANI SEBAGAI TANGGAL RESMI HARI BURUH.
- 1968**: HARI BURUH 'DITABURKAN' SEPANJANG ORDE BARU.
- 1999**: WALAUPUN SUDAN HARI BURUH, HARI BURUH KEMBALI DIHAYAKAN DENGAN DEMONSTRASI DI BERBAGAI KOTA.
- 2013**: SBY MENCANANGKAN HARI BURUH DI HARI BURUH PADA TAHUN 2014.

MAYJEN TNI TOTO SISWANTO, S.IP, MM

**SUKSES DALAM KARIR,
SUKSES DALAM MEMBINA KELUARGA**



Mayor Jenderal TNI Toto Siswanto, S.IP, MM, pria kelahiran Subang 55 tahun lalu adalah seorang Perwira low profile yang ditugaskan pada instansi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas). Sejak kecil, Toto memang sudah bercita-cita menjadi tentara. Terlahir dari seorang ayah yang juga seorang tentara Angkatan Darat (AD) dengan pangkat terakhir Mayor Chb, semakin menguatkan keinginannya. Restu orang tua pun menghantarkannya menuju pendaftaran Akabri tahun 1980 dan lulus pada 1984, tergabung dalam korps Artileri Medan (Armed). Dengan restu orang tua dan seluruh keluarga, ia menjalani pendidikan dasar militer selama 4 tahun yang tidak mudah tentunya, sampai akhirnya ia lulus sebagai perwira remaja TNI AD dalam usia 22 tahun. Walaupun usianya masih relatif muda, namun jiwa korsa dan tanggung jawab yang tinggi sudah tertanam dalam nafas kehidupannya.

Pria yang memiliki dua orang anak ini, mengawali karir perwiranya dengan penugasan sebagai Perwira Peninjau (setingkat Komandan Peleton) pada Batalyon Armed 2 Dam I/BB – Kodam I Bukit Barisan. Pengalaman berkesan selama menjadi anggota TNI yang diceritakan kepada Catra adalah pada saat ia bertugas sebagai Guru Militer ketika ia masih dalam kepangkatan Kapten dan Mayor. Toto yang senang mengajar, ditugaskan di pusat pendidikan Armed di Cimahi, lebih jelasnya pada Pendidikan Calon Tamtama (Secata), Pendidikan Calon Bintara (Secaba) dan Pendidikan Perwira (dari kecabangan Artileri Medan). Hal ini tidaklah mudah seperti yang orang lain pikirkan. Banyak kendala yang harus dihadapi. Salah

satunya, fasilitas yang belum memadai dimana ia harus menghadapi ratusan prajurit pelajar. Namun, semua itu dijalannya dengan senang hati dan ikhlas. Saat itu yang terpikirkan olehnya hanya bagaimana bisa bekerja sebaik mungkin, dengan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Toto menyadari kalau hal ini membutuhkan kesungguhan dan kesabaran. Oleh sebab itu, ia selalu berusaha berada di dalam jalur yang seharusnya dengan mengikuti aturan-aturan serta kaidah yang sudah ditetapkan.

Berkat ketekunannya menjalankan tugas, dalam perjalanan karir selanjutnya, ia berkesempatan mengemban berbagai penugasan antara lain pada Batalyon Armed sebagai Komandan Batalyon, di Lembaga Pendidikan sebagai Guru Militer, di satuan teritorial sebagai Komandan Kodim dan di Tokyo, Jepang sebagai Atase Pertahanan. Puji dan syukur selalu ia panjatkan kehadirat Sang Pencipta yang telah begitu banyak memberikan anugerah kepadanya. Bukan hanya soal karir yang ia syukuri. Hal yang sama pun dilakukan dalam membina keluarga. Anak pertamanya, seorang perempuan adalah seorang Arsitek lulus dari Universitas Parahyangan, Bandung. Sementara anak keduanya, seorang laki-laki, lulus dari Sekolah Penerbang di Bali dan sekarang bekerja sebagai Pilot pada Garuda Indonesia Airlines.

Like father like son... begitulah bunyi sebuah pepatah asing. Sama halnya Toto, kedua orang anaknya juga punya hobi olahraga. Terutama sang putra, sangat menggemari olahraga menyelam. Bicara mengenai keluarga, Toto mengatakan bahwa kesuksesan yang diperoleh sampai saat ini tidak lepas dari peran keluarga yang selalu mendoakan dan mengingatkan untuk selalu taat beribadah serta tanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan kepadanya.

Pada 2012, Toto mendapat kesempatan promosi menjadi Brigadir Jenderal TNI sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 20/TNI/Tahun 2012 tanggal 4 April 2012. Ia yang pada waktu itu berpangkat Kolonel Arm dengan jabatan Paban IV/Bidlugri Sintel TNI dilantik menjadi Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategi Internasional (Bandep Urs. Lingstraint) Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas. Pelantikan dilangsungkan pada 27 Februari 2012 sesuai Surat Keputusan Sesjen Wantannas Nomor : Kep-34/II/2012 tanggal 24 Februari 2012. Sesjen Wantannas yang melantiknya pada waktu itu adalah Letjen TNI Junianto Haroen yang kini sudah meninggal dunia.

Setelah Tiga tahun menjabat Bandep Urs. Lingstraint, pada 2015 tepatnya tanggal 23 Oktober, ia menjalani perubahan posisi dalam rangka rotasi



jabatan. Kali ini ia dilantik sebagai Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategi Regional (Bandep Urs. Lingstrareg) pada kedeputusan yang sama. Pimpinan Setjen Wantannas yang melantik pada waktu itu adalah Letjen TNI Waris berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/748/IX/2015 tanggal 10 September 2015. Toto memang sosok Jenderal yang banyak diberikan anugerah. Karirnya terus merambat naik. Ia kembali mendapatkan kesempatan promosi menjadi Mayor Jenderal TNI

sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 52/TPA Tahun 2017, ia kembali dilantik oleh Sesjen Wantannas untuk yang ketiga kalinya pada Jumat (28/4/2017) silam. Pelantikan yang dipimpin oleh Letjen TNI Nugroho Widyotomo ini untuk meduduki jabatan sebagai Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan (Sahli Bid. Hankam) menggantikan pejabat sebelumnya yang telah memasuki masa purna bhakti yaitu Mayjen TNI Nana Rohana, SE, teman seangkatan pada waktu di Akabri dulu. Jabatan Sahli menurut Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah unsur pembantu Sesjen Wantannas di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.

Sebagai Sahli Bid. Hankam, tugas pokok Toto adalah melakukan pengamatan, menelaah, memberikan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai hal-hal tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan ketahanan nasional baik atas petunjuk Sesjen Wantannas maupun atas inisiatif sendiri.

Mayjen TNI Toto Siswanto, S.IP, MM adalah figur yang menjadikan semangat dan disiplin dalam bekerja sebagai kunci kesuksesan. Keramahannya dan sikap bersahabat kepada siapa saja patut dijadikan contoh.

DATA DIRI

- **NAMA** : Toto Siswanto, S.IP, MM.
- **PANGKAT/CORPS** : Mayor Jenderal TNI
- **JABATAN** : Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan
- **KESATUAN** : Dewan Ketahanan Nasional
- **TMT ABRI** : 27 September 1984
- **TTL** : Subang, 18 April 1962
- **SUKU BANGSA** : Jawa
- **AGAMA** : Islam
- **STATUS** : Menikah
- **PENDIDIKAN** : Strata 2
- **JUMLAH ANAK** : 2 (dua) orang
- **NAMA ISTRI** : Nini Mardiani
- KECAKAPAN BAHASA** :
- **INGGRIS** : Aktif
- PENUGASAN DAERAH OPERASI** :
- **Ambon 2000**
- PENUGASAN LUAR NEGERI** :
- 1. Amerika Serikat 1989, 2009, 2010, 2011
- 2. Inggris 1992, 1996
- 3. Finlandia 1995
- 4. Jepang 2003-2006, 2011
- 5. Australia 2008, 2010, 2011
- 6. Thailand 2010, 2011
- 7. Malaysia 2010, 2011
- 8. Singapura 2010, 2011
- 9. Italia 2010
- 10. Korea Selatan dan Vietnam 2010
- 11. Kamboja 2012
- 12. RRC 2014
- 13. Austria 2016
- RIWAYAT JABATAN** :
- 1. Danton Yon Armed 2 Dam I/BB
- 2. Pajau Yon Armed 2 Dam I/BB
- 3. Parai Yon Armed 2 Dam I/BB
- 4. Kasipers Yon Armed 2 Dam I/BB
- 5. Pabung Yon Armed 2 Dam I/BB
- 6. Gumil Gol VII Pusdikart Pussenart
- 7. Danyon Armed 13 Kostrad
- 8. Kabag Dik Rindam VII/ WRB
- 9. Dandim Pinrang Korem 142 Dam VII/WRB
- 10. Kadep Intel Satinduk Bais TNI
- 11. Pasidik Sdiklat Satinduk Bais TNI
- 12. Atase Pertahanan RI untuk Jepang
- 13. Asum Satinduk Bais
- 14. Paban I Dit B Bais TNI
- 15. Paban VI Dit B Bais TNI
- 16. Paban IV/ Bidlugri Sintel Mabes TNI
- 17. Bandep Lingstrait Kedeputusan Jiandra
- 18. Bandep Lingstrareg Kedeputusan Jiandra
- 19. Sahli Bid. Hankam

SELAMAT BERTUGAS DI UNIT YANG BARU,
MAYJEN TNI TOTO SISWANTO, S.IP, MM.
SEMOGA SUKSES SELALU MENYERTA!....****

(Sesuai hasil wawancara oleh : Desi)

TOLERANSI PENGGUNAAN CANTRANG HINGGA 2017

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan penggunaan alat penangkapan ikan (API) jenis trawl atau pukat atau cantrang tak lagi diperbolehkan. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kalau pemerintah daerah ingin memberikan izin kepada nelayan di atas 30GT, kapal tersebut hanya bisa beroperasi di bawah 12 mil, wilayah yang menjadi otoritas provinsi.

Pasalnya, pemerintah memastikan nelayan di daerah lain pasti juga tidak ingin wilayah perairannya dirusak oleh cantrang. Di Kalimantan, Arafuru, Papua, mereka semua tidak membolehkan. Karena kalau nelayan yang pakai cantrang masuk, nelayan tradisional Papua yang modernitasnya jauh di bawah nelayan Jawa pasti susah dapat ikan. Atas dasar itu pemerintah wajib memberikan proteksi sampai nelayan di Papua, hingga mereka bisa mengelola sendiri hasil lautnya.

Sebagai informasi, pelarangan penggunaan cantrang diatur, mulanya, dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 503/Kpts/UM/7/1980. Peraturan itu, pada intinya mengizinkan cantrang hanya diberikan bagi kapal di bawah 5GT dengan kekuatan mesin di bawah 15PK.

Dalam perkembangannya, jumlah kapal yang menggunakan cantrang di Jawa Tengah bertambah dari 3209 pada 2004 menjadi 5100 pada 2007 dengan ukuran mayoritas diatas 30GT. Permasalahan timbul karena banyaknya kapal cantrang di atas 5GT yang izinnnya dikeluarkan oleh pmda dengan API yang lain. Sehingga, terjadi upaya hukum untuk menertibkan dan menimbulkan konflik dengan nelayan di daerah lain.

Permasalahan lain adalah terjadinya penurunan produksi sebesar 45 persen dari 281.267 ton pada 2002 menjadi 153.698 ton pada 2007. Situasi tersebut juga berdampak pada penurunan sumber daya ikan demersal sebanyak 50 persen.

Seiring waktu berjalan, pemerintah menyempurnakan peraturan pelarangan tersebut

Oleh: Desi

dengan Permen KP No.2/PERMEN-KP/2015. Pada Pasal 2 beleid itu disebutkan, "Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan *trawls* dan alat penangkapan ikan *seine nets* di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan aturan tersebut maka cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang dioperasikan di seluruh WPP-NRI".

Cantrang adalah salah satu jenis API yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*). Sejumlah nelayan khususnya yang berada di sekitar Jawa Tengah mengenal istilah cantrang atau dogol atau pukat dogol sebagai pukat kantong yang dioperasikan di dasar perairan, terutama untuk menangkap ikan-ikan demersal dan hewan-hewan dasar lainnya.

Cantrang biasanya disamakan dengan *demersial danish seine* yang dipakai di dunia barat. Pukat dogol atau cantrang sendiri berbeda dengan pukat harimau (trawl), karena cantrang tidak ditarik kecuali sepanjang tali utamanya saja. Didasarkan pada pertimbangan kelangsungan ekosistem laut Indonesia, larangan penggunaan API jenis trawl atau pukat atau cantrang melalui Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan API *Trawls* dan *Seine Nets* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik mulai diberlakukan

sejak 2015 silam. Namun demikian, tak ayal pelarangan ini menuai banyak protes dari sana-sini khususnya dari pihak nelayan. Keputusan untuk melarang penggunaan cantrang oleh KKP tentu memiliki alasan yang kuat. Pun para nelayan sebetulnya menyadari bahwa penggunaan alat tangkap cantrang tidak menguntungkan. Selain merusak ekosistem, hasil tangkapan cantrang didominasi ikan kecil yang harganya pun murah di pasaran.

Namun toh tetap saja masih banyak nelayan yang menggunakan cantrang dengan alasan hasil tangkapan yang didapat lebih banyak.

Selaras dengan larangan penggunaan cantrang oleh KKP, sebuah kajian dari *World Wildlife Fund* (WWF)-Indonesia pada 2015 silam menyebutkan bahwa hanya sekitar 18-40% hasil tangkapan *trawl* dan cantrang yang bernilai ekonomis dan dapat dikonsumsi.

Sekitar 60-82% adalah tangkapan sampingan (*bycatch*) atau tidak dimanfaatkan (*discard*), sehingga sebagian besar hasil tangkapan tersebut dibuang ke laut dalam keadaan mati. Penggunaan *trawl* dengan mengeruk dasar perairan merusak habitat serta penggunaan mata jaring yang kecil juga menyebabkan tertangkapnya berbagai jenis biota yang masih anakan atau belum matang gonad.

Persoalan yang sangat memprihatikan adalah pemborosan sumberdaya ini telah terjadi terus menerus sejak alat tangkap ini dipergunakan secara luas pada tahun 1960. Untuk lebih jelasnya berikut dampak buruk dari penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan:

Pertama adalah hasil tangkapan cantrang tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran ikan, udang, kepiting, serta biota lainnya. Biota-biota yang belum matang gonad dan memijah yang ikut tertangkap tidak dapat berkembang biak menghasilkan individu baru. Kondisi ini menyebabkan deplesi stok atau pengurangan stok sumber daya ikan, hasil tangkapan akan semakin berkurang.

Kedua, biota yang dibuang akan mengacaukan



Gambar oleh : Google

data perikanan karena tidak tercatat sebagai hasil produksi perikanan. Analisis stok sumber daya perikanan pun menjadi kurang akurat sehingga menyebabkan tidak sesuai kebijakan pengelolaan dan kenyataan kondisi sumber daya perikanan.

Ketiga, pengoperasian cantrang yang mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir tanpa terkecuali terumbu karang dan merusak lokasi pemijahan biota laut. Meskipun cantrang menghindari Terumbu Karang, tetapi kelompok-kelompok kecil karang hidup yang berada di dasar perairan akan ikut tersapu.

Keempat, sumber daya ikan di perairan laut Indonesia akan mengalami degradasi dikarenakan padatnya aktivitas penangkapan dari berbagai daerah termasuk dalam penggunaan alat tangkap cantrang. *Fishing ground* (lokasi penangkapan) nelayan akan ikut berpindah dan menjauh, serta biaya operasional penangkapan semakin tinggi.

Dengan adanya larangan penggunaan cantrang dan beralih ke alat penangkap ikan lainnya dapat meningkatkan penghasilan para nelayan. Meskipun jumlah tangkapan ikan memang menurun karena alat tangkap yang digunakan lebih selektif, namun nilai produksinya justru melonjak.**** (diolah dari berbagai sumber)

ANTISIPASI DAN SOLUSI KONFLIK SOSIAL DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL (SEMINAR NASIONAL DAN LOKAKARYA DI LAMPUNG)



Sesjen Wantannas dalam kegiatan Semiloka dengan Universitas Lampung Tanggal 22-25 Mei 2017

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) kembali bekerja sama dengan Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan Seminar Nasional dan Lokakarya (Semiloka) dengan mengusung tema “Antisipasi dan Solusi Konflik Sosial Dalam Rangka Ketahanan Nasional”, bertempat di Ballroom Novotel Hotel Lampung, selasa (23/5/2017). Acara dibuka secara resmi oleh Sesjen Wantannas, Letjen TNI Nugroho Widyotomo bersama Wakil Rektor I Unila, Prof. Dr. Bujang Rachman, M.Si. Hadir sebagai pembicara pada kegiatan ini Sekretaris Daerah Lampung Ir. Sutomo, MM., mewakili Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang pada saat itu berhalangan hadir.

Pada awal sambutannya, Sesjen Wantannas menjelaskan secara singkat tentang instansi Wantannas yang merupakan lembaga yang dibentuk dan diketuai oleh Presiden serta mempunyai tugas pokok merumuskan rancangan

kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.



Sesjen Wantannas bersama Bandep Urs. Hankam Kedeputusan Pengembangan Marsma TNI Uganda Irwanto

Lebih lanjut dikatakan oleh Sesjen Wantannas, bahwa Provinsi Lampung merupakan miniatur Indonesia. Masyarakat Lampung sangat beragam etnis, suku bangsa, budaya, dan agamanya. Struktur masyarakat disana terdiri dari masyarakat asli dan pendatang. Masyarakat asli Lampung merupakan masyarakat adat yang geneologis (garis keturunan berdasarkan ikatan darah), terdiri dari masyarakat adat Lampung Pepadun dan Saibatin.

Sementara masyarakat pendatang berasal dari Jawa, Bali, Semendo Ogan (Sumatera Selatan), Sunda dan Banten. Masyarakat pendatang inilah yang menjadi dominan di Lampung. Menurut data BPS Tahun 2010 populasi penduduk Lampung yang 7 juta jiwa, 6 juta di antaranya adalah pendatang, hanya 1 juta jiwa yang merupakan penduduk asli Lampung. Di antara 6 juta jiwa tersebut, 5 juta jiwa diantaranya adalah suku Jawa, 1 juta jiwa sisanya adalah suku Bali, Ogan (Palembang), Banten (Jaseng), Sunda, Batak dan suku lainnya yang tinggal di provinsi ini.

Keragaman masyarakat Lampung senantiasa diupayakan untuk dijaga, dirawat, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakatnya. Usaha tersebut tidak mudah, karena keragaman masyarakat Lampung telah menjadi pemicu konflik sosial yang terjadi di sepanjang tahun di Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai ini. Seluruh elemen masyarakat Lampung menghadapi berbagai ujian yang ditandai oleh rangkaian peristiwa konflik sosial di hampir sebagian besar daerah di Provinsi Lampung.

Dalam konteks konflik yang terjadi di Lampung bisa dilihat dari konteks ketahanan nasional, adalah bagaimana keuletan dan ketangguhan masyarakat Lampung yang multikultural dan multietnis dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan yang mengancam integrasi dan kerukunan sosial di Lampung. Ketahanan nasional sendiri sebagai kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa guna menghadapi dan mengatasi tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri baik yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

Dalam teori sosial, konflik adalah indikator perubahan. Oleh karena itu, wajar adanya apabila

terjadi dalam suatu masyarakat, baik masyarakat yang homogen maupun heterogen seperti di Lampung.

Mengakhiri sambutannya, Sesjen Wantannas menyampaikan bahwa, Setjen Wantannas menerima tugas dari Presiden yaitu



Sesjen Wantannas dalam kegiatan Semiloka dengan Universitas Lampung Tanggal 22-25 Mei 2017

pengelolaan dan penanganan masalah bela negara yang selama ini dikelola oleh Kementerian Pertahanan RI. Hal ini dimaksudkan agar pembinaan bela negara secara nasional dapat lebih terintegrasi. Seluruh kegiatan bela negara yang dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga akan berada dibawah koordinasi Wantannas.

Gubernur Lampung yang sedianya hadir sebagai *Keynote Speech*, berhalangan hadir, begitu juga dengan Rektor Unila yang diwakilkan kepada Wakil Rektor I Bapak. Prof. Dr. Bujang Rachman, kegiatan Seminar Nasional dan Lokakarya kali ini dihadiri oleh Kapolda Lampung, Danrem 043/Garuda Hitam, Danbrigif-3 Mar, Danlanal Lampung, Danlanud Pangeran M. Bunyamin, Walikota Lampung serta seluruh civitas akademika Unila.

Hadir sebagai penanggap daerah, perwakilan Universitas Islam Raden Inten Bandar Lampung Dr. M. Afif Anshori, MA, Pemerhati Sosial Budaya Lampung Zulkarnaen Zubairi, S.Sos, Dekan Fakultas Pertanian Unila, Prof Dr. Iwan, perwakilan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila Ari Dharma Siti, dan perwakilan Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Yuri Isman, sedangkan penanggap pusat dihadiri oleh Prof. Dr. Endang Turmudi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Drs. Edi Sudaryanto, M. Ikom dari Universitas 17 Agustus 1945. ****

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

Oleh: Desi

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2016 kepada Kementerian dan Lembaga yang berada di bawah wewenang pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara I. Penyerahan LHP sebanyak 15 dokumen dilakukan oleh salah satu anggota BPK, Agung Firman Sampurna kepada pimpinan Kementerian dan Lembaga di Auditorium Pusdiklat BPK, Jalan Binawarga II, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Adapun Kementerian dan Lembaga yang mendapat LHP keuangan kali ini adalah sebanyak 15 yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan,



Sesjen Wantannas Menerima LHP, Senin (29/5/2017)

yang disebabkan lemahnya sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Lebih lanjut dikatakan, ada sebanyak 11 temuan yang disebabkan oleh kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) diantaranya penetapan status aset belum tuntas, penatausahaan persediaan belum memadai, pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) belum sesuai dengan ketentuan, lemahnya pengelolaan kas perbendaharaan, penatausahaan piutang paten kurang memadai, dan pencatatan dan pelaporan hibah tidak memadai. Selain itu juga terdapat 18 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bentuk temuan ketidakpatuhan, antara lain, soal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan belanja barang yang tidak tertib, paket kerjaan yang terlambat belum dikenakan denda, dan pengadaan barang tak sesuai spesifikasi. Kemudian belanja perjalanan dinas lebih bayar, setoran sisa dana hibah tidak sesuai ketentuan, serta pemberian tunjangan kinerja dan uang makan pegawai belum sesuai ketentuan.

BPK sangat berharap Kementerian dan Lembaga negara dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai ketentuan. Hasil rekomendasi BPK pada 19 entitas di Auditorat Keuangan Negara (AKN) I untuk periode 2005 sampai semester II 2016 terdapat 12.109 rekomendasi (78,66 persen) sebesar Rp3,85 triliun telah ditindaklanjuti. Hadir dalam penyerahan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto serta sejumlah kepala lembaga terkait. ****



Sesjen Wantannas Foto Bersama Pimpinan K/L dalam Acara Penyerahan LHP oleh BPK

Lembaga Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Badan Keamanan Laut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan Badan Search and Rescue Nasional.

Dalam kesempatan ini, Agung menjelaskan, hasil pemeriksaan laporan keuangan mengungkap setidaknya ada 29 temuan signifikan



KUNJUNGAN MAHASISWA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Oleh: Yayat Ruhiyat

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional pada Rabu (17/5/2017) mendapat kunjungan dari mahasiswa/i Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang Provinsi Banten. Rombongan terdiri dari 80 orang mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Untirta serta didampingi oleh 2 orang dosen pembimbing. Maksud dan tujuan kunjungan ini adalah untuk lebih mengenal tugas dan fungsi Setjen Wantannas sebagai badan yang mengkaji dan membuat saran tindak kepada Presiden Republik Indonesia.

Sebelum melakukan lawatan ke Setjen Wantannas, Mahasiswa Untirta terlebih dahulu mengunjungi Kantor Kementerian Dalam Negeri RI. Sebagai perwakilan Sesjen Wantannas, ditunjuk Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan Mayjen TNI Toto Siswanto, S.IP., M.M.

Dalam sambutannya, Toto mengatakan bahwa Setjen Wantannas sangat senang dengan adanya kunjungan ini yang merupakan salah satu bentuk dari diseminasi dalam memperkenalkan lembaga Wantannas dan fungsinya kepada masyarakat. Disampaikan juga bahwa Setjen Wantannas sebagai institusi pemerintah yang diketuai dan berada langsung dibawah Presiden sangat mendukung peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan pemberi masukan-masukan.

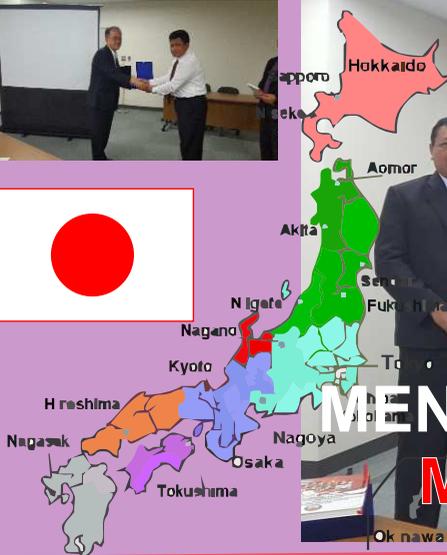
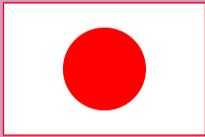
Kerjasama dengan berbagai Universitas Negeri kerap dilakukan dalam bentuk Seminar dan Lokakarya (Semiloka) bersama perguruan tinggi di berbagai daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menyerap aspirasi dari daerah yang notabene sangat mengetahui segala permasalahan di daerahnya sendiri, sebagai bahan masukan

rekomendasi dan tindak lanjut kepada Presiden.

Sebagai pemapar, Analis Kebijakan Bidang Politik dan Keamanan Kedeputusan Sistem Nasional Setjen Wantannas Kolonel Tek. Bonan D.O. Siagian, S.E., M.Si (Han) yang memaparkan tentang tugas dan fungsi lembaga Setjen Wantannas. Ia turut menghimbau kepada para mahasiswa untuk selalu berpikir kritis terhadap segala bentuk permasalahan bangsa, serta membantu mencari solusi untuk kemajuan bangsa.

Dalam sesi tanya Jawab, sempat ditanyakan mengenai produk Wantannas yang sedang dan tengah dijalankan oleh Presiden, juga mengenai disintegrasi bangsa, isu komunisme yang sedang berkembang, serta mengenai perlunya amandemen Undang Undang Dasar 1945. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditanggapi dengan antusias oleh para pejabat Setjen Wantannas yang hadir pada waktu itu, seperti Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Laksda TNI Dr. Djajeng Tirto Soedarsono, Analis Kebijakan Bidang Sumber Daya Manusia Kedeputusan Sistem Nasional Kolonel Inf. Judi Paragina Firdaus, M.Sc., Analis Kebijakan Bidang Sosial Budaya Kedeputusan Sistem Nasional Kombes Pol. Drs. Bambang Sigit Priyono, M.Si, Analis Kebijakan Bidang Sosial Budaya Internasional Kedeputusan Pengkajian dan Penginderaan Ir. Hadian Ananta Wardhana, CES, dan Analis Kebijakan Bidang Telematika Kedeputusan Sistem Nasional Kolonel Inf. Joko Setyo Putro.

Kegiatan kunjungan diakhiri dengan foto bersama disertai penyerahan penghargaan berupa plakat dan cinderamata dari kedua belah pihak. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi perguruan tinggi yang bersangkutan maupun bagi Setjen Wantannas pada khususnya. ****



MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI MELALUI KAJIAN LUAR NEGERI

Oleh: Dr. Ir. Hendri Firman Windarto, M.Eng.

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) kembali melaksanakan Kajian Luar Negeri (Kajilu) pada 7-13 Mei 2017 dengan mengusung tema “Pemanfaatan Teknologi Nuklir dalam Memenuhi Kebutuhan Energi (Listrik) di Indonesia Guna Mendukung Percepatan Pembangunan dan Memelihara Ketahanan Nasional di Bidang Energi.” Setjen Wantannas memilih Jepang sebagai Negara tujuan. Alasan Jepang ditetapkan sebagai tujuan, lebih kepada ketahanan energi Jepang yang mendapat prioritas tersendiri dalam politik luar negeri negara yang mendapat julukan ‘Matahari Terbit’ itu.

Sebagaimana perlu diketahui, untuk mendukung industrialisasi dan kemajuan ekonomi, Jepang memerlukan pasokan energi dalam jumlah besar, sementara sumber energi dalam negeri sangat terbatas. Oleh sebab itu, kebijakan untuk memastikan stabilitas pasokan energi dari luar negeri menjadi penting bagi para pengambil kebijakan Jepang. Pada 60-an seperti halnya Indonesia, Jepang sangat tergantung dengan minyak bumi dalam pemenuhan kebutuhan energinya. Hingga pada 1973, Jepang mengalami “oil crisis” dan mengimpor sekitar 84% dari kebutuhan energi primer. Sejak itu Jepang mengurangi ketergantungan energi primer, yaitu minyak bumi dan beralih ke energi lain seperti nuklir, gas bumi, dan tenaga angin.

Persoalan ketahanan energi nasional memang masih menjadi salah satu isu yang hingga saat ini masih hangat diperbincangkan berbagai kalangan. Hal ini terus mencuat lantaran semakin hari cadangan minyak nasional semakin berkurang. Lebih diperparah dengan semakin meningkatnya konsumsi minyak bumi oleh masyarakat. Pemerintah sampai saat ini masih mencari solusi alternatif untuk mengantisipasi krisis energi di masa

depan.

Sampai saat ini, Indonesia masih menjadi negara dengan konsumsi minyak bumi terbesar bersama beberapa negara berkembang lainnya. Menurut *World Energy Council (WEC)*, Indeks energi Indonesia berada pada ranking 85 dari 125 negara yang telah disurvei dengan nilai index BCC yaitu Energi Security B, Energi Equity C dan Environmental Sustainability C. Ranking indeks energi Indonesia tidak mengalami kemajuan pada posisi 83 pada 2014, posisi 82 tahun 2015 dan bahkan makin menurun posisi 85 pada 2016.

Sementara itu, berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia masih tergolong sebagai negara menengah, sedangkan untuk kawasan ASEAN, posisi Indonesia berada di bawah Thailand, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Untuk mengangkat Indonesia dari kelompok negara menengah menjadi negara maju yang mempunyai daya saing yang kuat, diperlukan energi yang besar, yaitu minimal mencapai 115.000 MW pada tahun 2025.

Kunjungan Delegasi Setjen Wantannas yang dipimpin oleh Sesjen Wantannas Letjen TNI Nugroho Widyotomo dengan didampingi oleh Staf Ahli Bidang Iptek Dr. Ir. Hendri Firman Windarto, M.Eng, Staf Ahli Bidang Ekonomi Irjen Pol. Drs. Bambang Hermanu, SH, MM, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Laksda TNI Dr. Djajeng Tirto Soedarsono dan Analis Kebijakan Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Kedeputusan Sistem Nasional Kolonel Kav. Syachrial E. Siregar, SE.

Kunjungan ke negeri Sakura ini sudah pasti tidak terlepas dari adanya hambatan dalam pemanfaatan teknologi nuklir yang dewasa ini banyak digunakan di Jepang, untuk menjadi pertimbangan mendukung percepatan pembangunan ketahanan nasional pada bidang energi di Indonesia. Terdapat beberapa persoalan

yang menghambat pemanfaatan energi nuklir di Indonesia yaitu (1) Mekanisme kebijakan keputusan tertinggi ketika menghadapi krisis energi; (2) Pertumbuhan ekonomi yang tidak berbasis pada industri yang kuat; dan (3) Permasalahan sosial budaya cukup menjadi hambatan pemanfaatan PLTN dalam pemenuhan energi listrik.

Kegiatan yang berlangsung selama tujuh hari tersebut, salah satu agendanya adalah melaksanakan koordinasi dengan *Ministry of Economic, Transportation and Industry* (METI) dan *Agency of Natural Resources and Energi* (ANRE) yang merupakan lembaga negara yang melakukan kebijakan dan pengelolaan energi nasional Jepang. Tim Kajilu mempelajari beberapa aspek penting dalam kebijakan METI dan ANRE terkait kebijakan layanan publik dan pemanfaatan energi sebagai penopangnya dalam menghadapi krisis energi.

Sementara itu, kunjungan ke *Tokyo Electric Power Company* (TEPCO) Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Kashiwazaki dan Kariwa pun dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Jepang memanfaatkan sumber energi nuklir dengan menerapkan sistem keselamatan dan keamanannya paska bencana tsunami Fukushima yang menyebabkan terjadinya “kerusakan PLTN Fukushima” pada tahun 2011. TEPCO yang merupakan perusahaan milik pemerintah ini bertanggung jawab untuk pemenuhan energi di wilayah Kanto Jepang. Dengan mengandalkan berbagai sumber daya energi yang bisa dimanfaatkan.

Kunjungan tersebut menghasilkan beberapa poin yang cukup krusial menyangkut pemanfaatan dan pemenuhan bauran energi primer sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Diharapkan pada 2025, peran Energi Baru dan Energi Terbarukan paling sedikit mencapai 23%; minyak bumi kurang dari 25%; batubara minimal 30%; gas bumi minimal 22%, serta terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada 2025 total sekitar 115.000 MW. Diperkirakan terjadi kekurangan energi listrik sebesar 5000MW. Di lain sisi belum ada kebijakan “terobosan” untuk mengantisipasi kekurangan tersebut.

Belajar dari situasi di negara Jepang paska bencana tsunami Fukushima dan “kerusakan PLTN Fukushima”, bahwa kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam menangani pengoperasian energi listrik dapat terjalin dengan baik, khususnya pada mekanisme pengambilan keputusan yang cepat pada perubahan komposisi energi nasional, perubahan ketahanan ekonomi dapat terantisipasi dengan baik, dan bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan untuk menyeimbangkan pemahaman tentang “keselamatan, keamanan energi, ketahanan ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan.”

Kegiatan Kajilu ke negara Jepang

menghasilkan pemahaman kebijakan pengelolaan energi yang mendukung pertumbuhan industri dan ekonomi, serta pengelolaan pendidikan dan penerimaan masyarakat *Public Education and Acceptance* (PEA) terkait pemanfaatan energi nuklir sebagai berikut:

- a. Jepang memiliki sumber energi dalam negeri yang sangat kecil sekitar 16% dengan kebutuhan energi nasional sekitar 155.000MW. Sisanya sekitar 84% diimpor. Jepang mengalami “Oil Shock” pada tahun 1973 dan 1978.
- b. Penghentian sebagian besar PLTN Jepang, mengakibatkan impor LNG meningkat hampir 46% untuk memenuhi kebutuhan energi listriknya. Peningkatan impor LNG mengakibatkan harga listrik untuk kebutuhan rumah tangga naik 20% dan untuk kebutuhan industri naik 30%. Pengaruh lanjutannya adalah terjadi defisit neraca perdagangan terbesar dalam sejarah Jepang sekitar 15 trilyun Yen pada 2014 yang disebabkan oleh impor bahan bakar yang meningkat hampir 64% dari kebutuhan sebelum kecelakaan Fukushima.
- c. Sebelum kecelakaan Fukushima pendekatan sosialisasi energi nuklir terkait PEA lebih difokuskan kepada kepentingan dan kebutuhan negara pada pemanfaatan energi nuklir. Setelah kecelakaan Fukushima kegiatan PEA lebih difokuskan kepada pengetahuan dasar radiasi dan pengaruh radiasi yang mungkin terjadi melalui aktivitas-aktivitas pengukuran untuk menjelaskan kritik-kritik di media massa yang makin meningkat.

Saat ini kegiatan PEA sudah mulai normal pada dua hal terkait aspek keselamatan PLTN dan kebutuhan konsumsi listrik nasional berdasarkan perencanaan energi dasar dan “energy mix” yang membutuhkan energi nuklir. Penjelasan itu membutuhkan fakta yang obyektif dan bukti scientific untuk menggambarkan “well-balanced 3E+S”. 3E adalah *Energy, Economy, Environment* dan S adalah *Safety*.

Terjadi paradigma baru dalam usaha untuk sosialisasi kepada masyarakat agar terjadi keseimbangan pemahaman di dalam masyarakat bahwa selain *Safety* sebagai prioritas utama, perlu keseimbangan terkait *Energy Security* yang dapat dipenuhi secara mandiri kembali sekitar 25% lebih tinggi dari setelah kecelakaan Fukushima, *Economic efficiency* yang saat ini menurun karena kenaikan biaya pembangkitan listrik, dan *Environment* terkait penurunan target emisi gas rumah kaca.

Sebagai sebuah kesimpulan bahwa terkait sosialisasi energi nuklir perlu merubah persepsi masyarakat dari sebuah ketakutan menjadi bahwa setiap musibah merupakan hikmah peningkatan pengetahuan sebuah prosedur keselamatan dan keamanan nuklir dalam mencapai ketahanan energi nasional.****

PRESIDEN JOKO WIDODO BERI APRESIASI PADA PENGGIAT LITERASI SE-INDONESIA

Oleh: Rudianto



Rudianto Foto Bersama
Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo mengundang para pegiat literasi se-Indonesia untuk datang ke Istana Negara dalam acara makan siang bersama. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei. Sebanyak 38 orang pegiat Literasi Inspiratif dan Pengelola Taman Baca Masyarakat (TBM) menghadiri acara ini.

Salah satu pegiat yang mendapat undangan kehormatan ini adalah seorang pedagang tahu keliling asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang dalam kesehariannya berjualan tahu sambil meminjamkan buku gratis kepada warga sekitar hingga ke daerah terpencil di kecamatan tersebut. Pejuang literasi ini bernama Rudianto yang biasa disapa Mang Yayat. Pria berusia 39 tahun ini berupaya mencerdaskan masyarakat dengan mendirikan Perpustakaan Keliling Tahu Baca, dan dibangun dengan merelakan sebagian rumahnya yang beralamat di Jalan Gunung Puntang Kampung Pasirhuni RT 05/06 Desa Pasirhuni Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Jawa Barat, disulap menjadi taman bacaan.

Presiden Joko Widodo, pada saat memberikan sambutan mengatakan bahwa acara ini merupakan sebuah apresiasi untuk para pejuang pendidikan dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia melalui membaca, dan suatu kebanggaan bisa duduk dan makan siang bersama para pegiat dari berbagai daerah. Presiden berharap melalui kegiatan ini munculah gagasan-gagasan untuk kemajuan masyarakat Indonesia dalam meningkatkan budaya membaca di tanah air.

Rudianto sendiri merasa bangga dapat bertemu langsung bertemu dengan Presiden yang menjadi idolanya itu. "Suatu kehormatan bagi saya, penjual

tahu keliling, berasal dari kampung bisa menginjak kaki di istana Presiden, bersama istri tercinta yang selama 20 tahun menemani saya dalam menumbuhkan minat baca di daerah saya, hingga akhirnya saya mendapat undangan makan siang bareng bersama presiden. Saya sendiri tidak menyangka dan tidak percaya pada saat menerima telepon dari staf Sekretaris Pribadi Presiden, bahwa saya merupakan salah satu orang yang diundang oleh Presiden untuk makan siang di istana," ujar Rudianto.

Rudianto atau Mang Yayat menambahkan, dalam diskusi antara Joko Widodo dan para pegiat literasi, Ketua Umum FTBM Pusat Firman Venayaksa, menyampaikan ada delapan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan gerakan Literasi Nasional. Sementara Koordinator Bapak Pustaka Bergerak Indonesia Nirwan Ahmad Arsuka yang mengatakan bahwa warga Indonesia bukan lemah dalam hal membaca.

"Warga Indonesia bukan lemah atau rendah dalam membaca, ini bisa dibuktikan ketika para pegiat literasi yang melakukan gerilya ke daerah terpencil serta masuk ke daerah pinggiran. Mereka disambut antusias oleh warga yang didatangi seperti anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua. Justru masalah yang sebenarnya adalah bagi para pelaku pustaka bergerak sangat susah untuk mendapat bantuan pasokan buku karena mentok diharga pengiriman yang tidak seimbang dari jumlah harga buku yang dikirim, saya harap pak Presiden bisa mengeluarkan kebijakan untuk menggratiskan pengiriman buku, minimal dalam satu bulan satu hari ada yang digratiskan khusus untuk pengiriman buku, sehingga kami bisa mendapatkan buku dengan mudah dan gratis," jelas Firman.

Pada akhir acara, Presiden Joko Widodo berjanji akan mengeluarkan kebijakan dalam membebaskan biaya pengiriman buku ke seluruh Indonesia, dalam kurun waktu satu hari dalam satu bulan dan bekerja sama dengan PT POS Indonesia yang terealisasi pada perayaan Hari Buku, 17 Mei 2017 silam.****



NIKMATI MALAM DI MALIOBORO BERSAMA MUSIK CALUNG FUNK

Oleh: Desi

Malioboro merupakan kawasan perbelanjaan legendaris yang menjadi salah satu kebanggaan kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Penamaan Malioboro berasal dari bahasa Sansekerta. Kata “malioboro” bermakna karangan bunga. Mungkin ada hubungannya dengan masa lalu ketika Keraton Yogyakarta akan mengadakan acara besar, maka jalan malioboro dipenuhi dengan bunga.

Salah satu yang menjadi kekhasan Malioboro adalah musik calung. Di Yogyakarta memang berkembang musik calung. Bahkan di pinggir jalan atau di dekat lampu lalu lintas, kita bisa menyaksikan sekelompok orang yang “ngamen” musik calung.

Calung sendiri adalah alat musik Sunda yang merupakan prototipe (purwarupa) dari angklung. Berbeda dengan angklung yang dimainkan dengan cara digoyangkan, cara menabuh calung adalah dengan memukul batang (wilahan, bilah) dari ruas-ruas (tabung bambu) yang tersusun menurut titi laras (tangga nada) pentatonik (da-mi-na-ti-la). Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi wulung (bambu hitam), namun ada pula yang dibuat dari awi temen (bambu yang berwarna putih).

Yogyakarta sebagai kota budaya, ternyata tidak hanya menyuguhkan apa yang menjadi ciri khas daerahnya saja. Dalam hal seni musik pun kota ini identik dengan gamelan, keroncong, dan campur sari. Namun, jika kita menyempatkan berkeliling di seputaran Jalan Malioboro, kita akan menemui tiga sampai empat kelompok musisi jalanan yang

memainkan alat musik dari bambu. Salah satunya adalah Calung *Funk*.

Calung *Funk* merupakan kelompok musik yang kerap dimainkan di seberang Malioboro Mall. Alat musik yang dimainkan tak hanya yang terbuat dari bambu, namun ada bedug dan perkusi yang membuat suasana menjadi semarak. Kelompok ini terdiri dari enam orang personel yang memainkan alat musik seperti bedug kecil, kempul/kentong, gambang, bedug bass, angklung, dan perkusi. Setiap malam mulai pukul 20.00 sampai 22.00, mereka siap menghibur wisatawan dengan alunan musik khas Banyumas.

Perjalanan Calung *Funk* diawali pada tahun 2008. Saat itu, keenam personel yang berasal dari Purbalingga ini hijrah ke Yogyakarta. Pertama datang ke Yogyakarta mereka tidak langsung main secara menetap di Jalan Malioboro. Setelah delapan tahun merintis sebagai musisi jalanan, akhirnya mereka diundang kemana-mana seperti hotel dan institusi pemerintahan maupun lembaga pendidikan. Tak jarang mereka mendapat undangan main diluar Yogyakarta seperti Magelang, Wonosobo, Kalimantan, dan Bali. Sempat pula mengisi program acara pada stasiun televisi swasta.

Namun, teritung 2016, pengamen Calung *Funk* yang biasa main di perempatan jalanan Kota Yogyakarta semakin sulit dijumpai. Kemungkinan disebabkan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah. Berbeda dengan Calung *Funk* yang biasa main di Jalan Malioboro. Mereka tidak pernah terkena penertiban, karena sudah legal dan resmi mendapatkan kartu identitas dari pihak pariwisata setempat.****

SATE TAICHAN ALA SENAYAN



Oleh: Ibu Afanti Uloli

Pernah melintas di Senayan dan membaca gerobak sate dengan lampu kerlap kerlip bertuliskan SATE TAICHAN? Penasaran kan apa sih Sate Taichan itu? Satu lagi kreasi sate ayam yang harus dicoba yang diberi nama Sate "Taichan", sate ini merupakan salah satu hasil inovasi sate ayam Madura yang memiliki citarasa berbeda dari olahan sate lainnya. Jika Sate Ayam Madura, Sate Kambing Madura dan Sate Padang selalu diolesi bumbu kacang dan kecap saat proses pembakaran, berbeda dengan Sate Taichan, karena sate ini tidak menggunakan bumbu kacang pedas dan kecap sama sekali, melainkan hanya di bakar begitu saja dengan sesekali diolesi minyak sayur agar memiliki warna putih pucat yang mengkilat.

Salah satu ciri khas dari sate unik yang sekarang lagi *hits* dan *happening* di kalangan anak muda Jakarta memang memiliki tampilan daging yang berwarna putih pucat. Hal ini bukan berarti daging ayamnya belum matang. Namun di karenakan saat membakar tidak menggunakan kecap atau bumbu kacang seperti yang saya katakan di atas.

Berminat mencoba? Silahkan simak uraian dibawah ini :

Bahan Bumbu Sate :

Dada ayam 1 buah, potong dadu
Jeruk nipis 2 sendok makan
Royco ayam 1 sendok makan
Minyak sayur sedikit saja

Bahan Sambal Sate :

Cabe rawit 7 buah
Cabe merah 15 buah
Bawang merah 5 butir
Bawang putih 4 siung
Tomat 1/4 buah (atau bisa pakai tomat kecil)
Air 50 mili liter
Gula pasir 1/2 sendok teh (bisa diganti gula Jawa/

gula merah)

Lada putih 1/2 sendok teh

Garam 1/2 sendok teh

Minyak untuk menumis secukupnya

Langkah Membuat Sate Taichan :

Pertama-tama potong dadu daging ayam, lalu lumuri dengan perasaan jeruk nipis, sedikit minyak sayur dan kaldu ayam. Diamkan selama 15 menit sampai bumbu meresap. Kemudian tusuk-tusuk ayam dengan tusukan sate lalu bakar sampai ayam berubah warna dan matang. Angkat, sisihkan.

Cara Membuat Sambal Sate :

Uleg halus atau blender semua bahan sambal. Kemudian tumis dengan minyak goreng. Koreksi rasa. Tumis sampai cabai matang dan tidak bau langu. Jika sambalnya terlalu kental maka boleh ditambahkan sedikit air lagi sampai mendapatkan sambal dengan kekentalan yang diinginkan. Angkat, matikan api kompornya.

Penyajian Sate Taichan Ayam:

Tata rapi sate di atas piring saji lengkap dengan lalapan seperti daun selada, timun, potongan tomat, kol dllnya lalu sajikan bersama sambal dengan keadaan terpisah.

Bisa juga dengan menggulingkan sate ke sambal, lalu sajikan dengan lalapan lengkap bersama nasi putih atau irisan lontong atau ketupat. Boleh ditambahkan bawang merah goreng jika suka.

Selain menggunakan daging ayam, sate taichan juga dapat dibuat dengan menggunakan daging sapi, kambing, bahkan seafood seperti udang dan cumi.

Nah...Sate Taichan ala Senayan siap menjadi santapan bersama keluarga tanpa harus repot pergi ke Senayan.

SELAMAT MENCoba....



Deputi Bid. Polstra Irjen Pol. Drs. Tjetjep Agus S, MM, MH, memimpin Jam Pimpinan, Senin (29/5/2017)



Sesjen Wantannas Ltjen TNI Nugroho Widyotomo dalam Kegiatan Semiloka Bersama Univ. Lampung pada tanggal 22-25 Mei 2017



Sesjen Wantannas Berikan Cenderamata kepada Pejabat yang Memasuki Purnatugas dan Mutasi, Jumat (19/5/2017)



Acara Silaturahmi DWP Setjen Wantannas Jumat (19/5/2017)



Rakernas 2017 DWP Setjen Wantannas di Bandung, (16-17 Mei 2017)



Kegiatan Penandatanganan MoU Bersama Univ. Khairun di Ternate, Maluku Utara (15-17 Mei 2017)

Majalah CATRA menerima artikel dan berita tentang suatu kegiatan atau apa saja. Panjang tulisan maksimal 500 kata, jenis huruf Arial, ukuran huruf 12, ukuran spasi 1,5 dan jenis kertas A4. Artikel dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* dengan format *MS. Word* ke alamat redaksi Majalah CATRA. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut tanpa mengurangi maksud dari isi tulisan. Artikel yang dimuat akan mendapat imbalan. Informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi Bagian Humas Biro Persidangan dan Humas Setjen Wantannas, Jalan Medan Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110.



**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL BESERTA STAF
MENGUCAPKAN
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H**